

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
MANGGARAI NTT TAHUN 2021-2023**

**Ringkasan Skripsi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana**



**Disusun Oleh:**

**YOHANA FLAFIANA MADUR**

**112131685**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA  
SEPTEMBER  
2025**

# LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH MANGGARAI NTT  
TAHUN 2021-2023

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**YOHANA FLAFIANA MADUR**

Nomor Induk Mahasiswa: 112131685

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arif'.

M. Arif Budiarto, Drs., M. Si., Ak., CA.

Penguji

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cahyo'.

Cahyo Indraswono, SE., M.Sc., Ak., CA.

Yogyakarta, 17 Januari 2025  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil dari kegiatan atau program yang telah atau akan dicapai terkait dengan penggunaan anggaran daerah yang diukur dari segi kuantitas dan kualitas. Adapun pemerintah daerah yang akan dianalisis kinerja keuangan yaitu pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Manggarai dari tahun 2021 sampai 2023. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui kinerja keuangan dari lembaga Bapenda Kabupaten Manggarai apakah sudah berjalan dengan baik atau benar. Metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah yaitu dengan menghitung rasio pertumbuhan, efektifitas, efisiensi, dan kemandirian. Hasil perhitungan menunjukkan, bahwa rasio pertumbuhan keuangan pemerintah manggarai pada tahun 2020-2021 sebesar 1.35% (positif), 2021-2022 sebesar -1.94% (negatif), 2022-2023 10.09% menunjukkan ketidaketapan rasio pertumbuhan. Rasio efektifitas menunjukkan pendapatan asli daerah dikatakan cukup efektif yaitu dengan kriteria 90-99%. Rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan pada tahun 2021 dikatakan kurang efisien, tahun 2022 tidak efisien, dan 2023 cukup efisien. Sedangkan, untuk kinerja keuangan dilihat dari Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten manggarai tahun 2021-2023 masih tergolong sangat rendah dengan presentase 0-25.

**Kata kunci:** Kinerja Keuangan, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **ABSTRACT**

*The financial performance of local governments is the result of activities or programs that have been or will be achieved related to the use of regional budgets measured in terms of quantity and quality. The local government that will be analyzed for financial performance is at the office of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Manggarai Regency from 2021 to 2023. The purpose of this research is to be able to find out the financial performance of the Manggarai Regency Bapenda institution whether it has run well or correctly. The method used to analyze regional financial performance is by calculating the ratio of growth, effectiveness, efficiency, and independence. The results of the calculation show that the manggarai government's financial growth ratio in 2020-2021 is 1.35% (positive), 2021-2022 is -1.94% (negative), 2022-2023 10.09% shows the uncertainty of the growth ratio. The effectiveness ratio shows that the region's original income is said to be quite effective, namely with a criterion of 90-99%. The efficiency ratio shows that financial performance in 2021 is said to be less efficient, 2022 is inefficient, and 2023 is quite efficient. Meanwhile, for financial performance, judging from the ratio of regional financial independence in Manggarai Regency in 2021-2023, it is still very low with a percentage of 0-25.*

**Keywords:** *Financial Performance, Growth Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Independence Ratio.*

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas otonomi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian keuangan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Kinerja keuangan daerah, yang diukur melalui rasio pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, dan kemandirian, mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efisien dan efektif. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai di BAPENDA selama periode 2021-2023 untuk menilai efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pencapaian target keuangan.

## TINJAUAN TEORI

### **Analisis Kinerja Keuangan**

### **Daerah dan Otonomi Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana Pemerintah Daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan UUD 1945 (Munawaroh 2019). Otonomi daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat perekonomian daerah melalui kebijakan ekonomi lokal dan pembangunan infrastruktur (Guntoro 2021; Rifai 2017).

### **Kinerja**

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kinerja adalah hasil kerja atau pencapaian yang menunjukkan kemampuan seseorang atau organisasi dalam menjalankan tugas selama periode tertentu. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, kinerja diukur dari penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan, visi, misi, dan target organisasi (Gea 2022).

## **Kinerja Keuangan dan Laporan Keuangan**

Kinerja keuangan adalah pengukuran hasil pengelolaan keuangan yang dilakukan melalui analisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan, untuk menilai efisiensi dan efektivitas pencapaian target (Putra 2022; Tumija and Sinta 2022). Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, harus mengikuti standar akuntansi pemerintah dan mencerminkan kondisi keuangan selama periode laporan realisasi anggaran (Fathah 2017).

## **Keuangan Daerah**

Keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 mencakup hak, kewajiban, dan kekayaan daerah yang diukur dengan uang untuk memenuhi tugas Pemerintah Daerah, dengan kepala daerah bertanggung jawab atas pengelolaannya (Runjung et al. 2022).

## **Analisis Rasio Keuangan**

Analisis rasio keuangan adalah proses untuk mengidentifikasi karakteristik keuangan daerah melalui perhitungan dan perbandingan elemen-elemen laporan keuangan guna menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah (Drastiana and Himmati 2021). Rasio-rasio yang digunakan meliputi rasio pertumbuhan, yang menilai kemampuan daerah

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dalam meningkatkan pendapatan dan belanja (Fathah 2017). Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Thn } t - \text{Pendapatan Thn } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

Rasio efektivitas, yang mengukur pencapaian target pendapatan asli daerah (Drastiana and Himmati 2021). Rumus untuk menghitung rasio efektivitas ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi, yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah (Tumija and Sinta 2022). Rumus untuk menghitung rasio efisiensi ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi pendapatan Daerah}} \times 100\%.$$

Rasio Kemandirian, yang menilai sejauh mana daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri (Runjung et al. 2022). Rumus yang dipakai untuk menghitung rasio kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

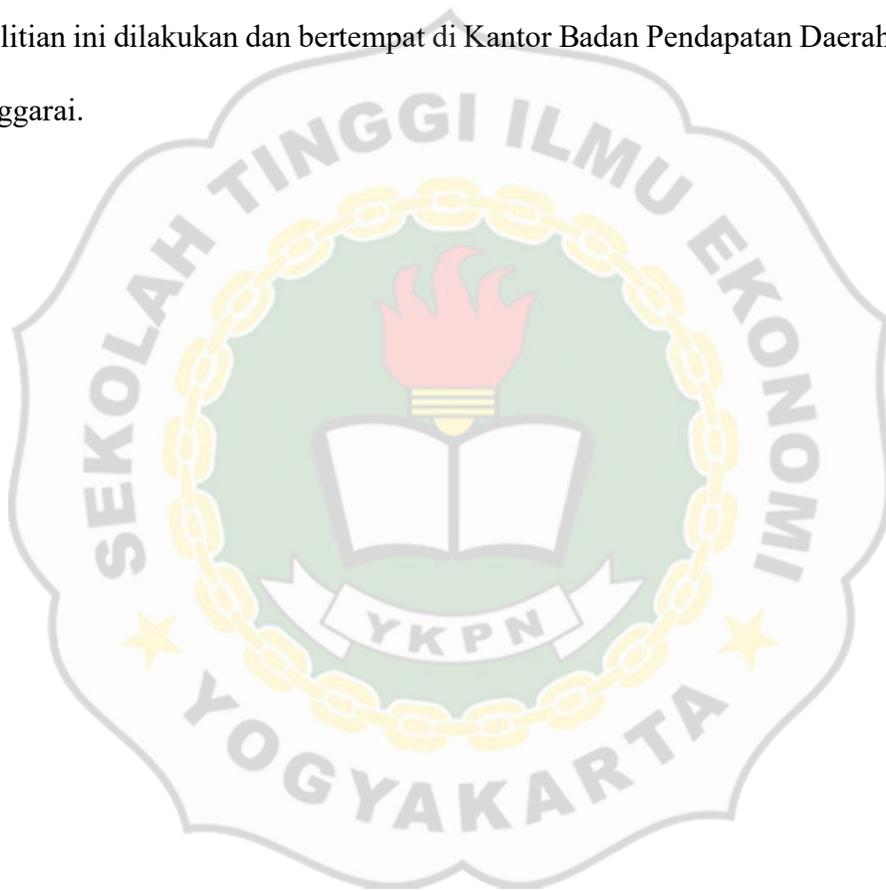
Menurut Arikunto (2006), menyatakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengenai suatu kondisi melalui penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyajian hasilnya (Arikunto 2020).

## **Waktu dan Tempat Penelitian**

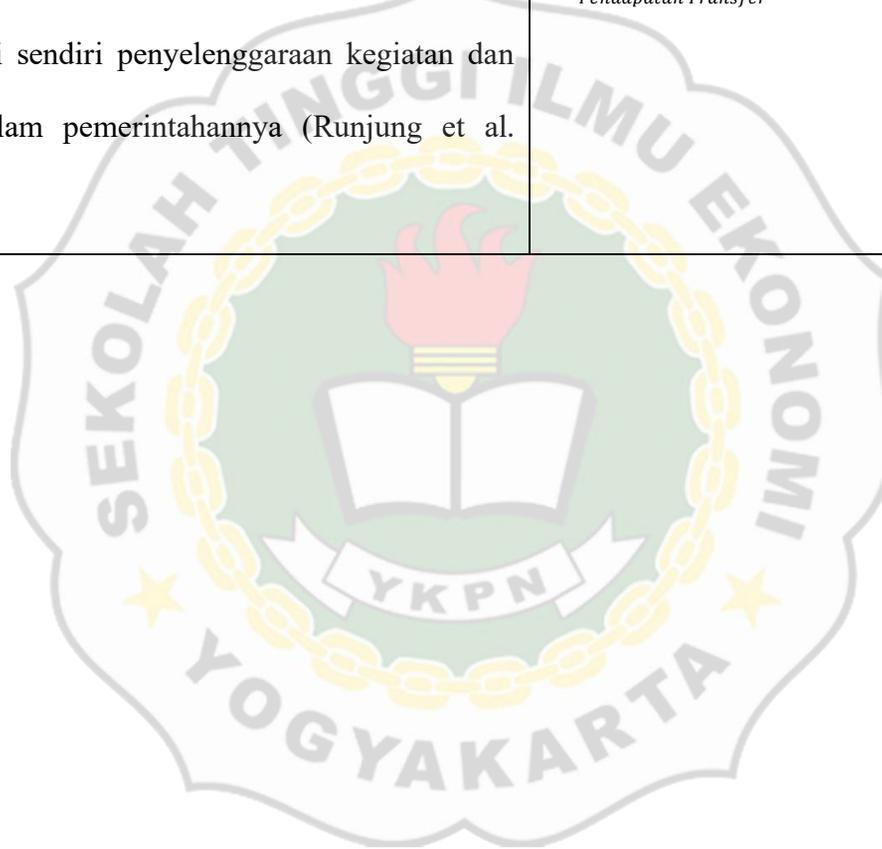
Penelitian ini dilakukan dan bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai.



### Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Rumus	Skala
1. Rasio Pertumbuhan	Menurut Abdul Halim dalam (Tumija and Sinta 2022) menyatakan rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan hasil yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.	Rasio Pertumbuhan = $\frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan tahun}(t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)} \times 100\%$	Rasio
2. Rasio Efektivitas	Rasio Efektivitas menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan (Kurniawan et al. 2023).	Rasio Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$	Rasio
3. Rasio Efisiensi	Rasio Efisiensi PAD menunjukkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk mencapai realisasi PAD dengan jumlah PAD yang tercapai (Tumija and Sinta 2022).	Rasio Efisiensi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	

<p>4. Rasio Kemandirian</p>	<p>Rasio Kemandirian adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan kegiatan dan urusan dalam pemerintahannya (Runjung et al. 2022)</p>	<p>Rasio Kemandirian = <math>\frac{\text{Pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%</math></p>	<p>Rasio</p>
-----------------------------	--	---	--------------



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan observasi untuk menganalisis kinerja keuangan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai. Dokumentasi bertujuan menyediakan informasi yang akurat dan memastikan keaslian data melalui laporan keuangan. Observasi dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data lengkap tentang kinerja keuangan di Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, yang kemudian disajikan dalam laporan keuangan.

## Model Analisis Data

### **Analisis Data Menggunakan Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Kemandirian**

Teknik pengolahan data menggunakan metode analisis data, untuk mengetahui kinerja keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 sampai 2023, maka dilakukan pengujian berdasarkan rasio:

1. Rasio Pertumbuhan =  $\frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t-1)} \times 100\%$
2. Rasio Efektivitas =  $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$
3. Rasio Efisiensi =  $\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan daerah}} \times 100\%$
4. Rasio Kemandirian =  $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}}$

## Perbandingan Kinerja Keuangan

Penelitian ini membandingkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian dari tahun 2021-2023:

## Perbandingan Rasio Pertumbuhan PAD

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut Mahmudi dalam (Nurabiah 2018), rasio pertumbuhan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan keberhasilan PAD dari satu periode ke periode berikutnya, dengan rasio yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik.

## **Perbandingan Rasio Efektivitas**

Rasio efektif mengukur seberapa baik suatu daerah mencapai target PAD, dengan kinerja keuangan dianggap efektif jika rasio melebihi 100%, dan dibagi menjadi kategori sangat efektif, cukup efektif, dan kurang efektif (Nurabiah 2018).

## **Perbandingan Rasio Efisiensi**

Rasio efisiensi menunjukkan perbandingan antara belanja dan pendapatan daerah, dengan kinerja dianggap efisien jika rasio di bawah 1 atau 100%, dan tingkat efisiensi dapat dikategorikan mulai dari efisien hingga tidak efisien (Halim dalam Nurabiah 2018).

## **Perbandingan Rasio Kemandirian**

Rasio kemandirian menggambarkan sejauh mana Pemerintah Daerah dapat membiayai kegiatan dengan PAD, dan rasio yang rendah menunjukkan ketergantungan besar pada bantuan Pemerintah Pusat (Nurabiah 2018).

## **BAB 4**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **Penyajian Data Hasil Penelitian**

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Manggarai, menggunakan empat rasio: rasio pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, dan kemandirian, dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4. 1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Manggarai Tahun 2021

No	Keterangan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Presentase (%)
<b>A.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp1,171,395,111,025</b>	<b>Rp1,142,553,988,621</b>	<b>98%</b>
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp104,045,446,627	Rp97,878,120,398	94%
2	Pendapatan Transfer	Rp1,003,835,484,398	Rp986,712,538,223	98%
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp63,514,180,000	Rp57,963,330,000	91%
<b>B.</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp1,219,431,496,229</b>	<b>Rp1,127,162,534,561</b>	<b>92%</b>
1	Belanja Operasi	Rp793,066,728,212	Rp721,098,288,730	91%
2	Belanja Modal	Rp180,207,065,790	Rp174,222,039,501	97%
3	Belanja Tak Terduga	Rp38,581,675,952	Rp24,271,887,055	63%
4	Belanja Transfer	Rp207,576,026,275	Rp207,570,319,275	100%
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>-Rp48,036,385,204</b>	<b>Rp15,391,454,060</b>	<b>6%</b>

Sumber: Data Bapenda Manggarai

Tabel 4. 2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Manggarai Tahun 2022

No	Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Presentase (%)
<b>A.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp1,148,633,546,856</b>	<b>Rp1,090,365,130,064</b>	<b>95%</b>
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp121,176,876,649	Rp110,722,937,745	91%
2	Pendapatan Transfer	Rp941,000,860,207	Rp919,332,114,485	98%
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp86,455,810,000	Rp60,310,077,834	70%
<b>B.</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp1,203,443,264,459</b>	<b>Rp1,105,257,718,284</b>	<b>92%</b>
1	Belanja Operasi	Rp832,537,175,122	Rp747,599,452,368	90%
2	Belanja Modal	Rp180,784,326,029	Rp169,206,541,293	94%
3	Belanja Tak Terduga	Rp7,000,000,000	Rp5,329,997,314	76%
4	Belanja Transfer	Rp183,121,763,308	Rp183,121,727,308	100%
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>-Rp54,809,717,603</b>	<b>-Rp14,892,588,220</b>	<b>27%</b>

Sumber: Data Bapenda Manggarai

Tabel 4. 3 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Manggarai Tahun 2023

No	Keterangan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Presentase (%)
<b>A.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Rp1,264,481,714,832</b>	<b>Rp1,216,213,398,172</b>	<b>96%</b>
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp151,208,677,479	Rp124,626,655,943	82%
2	Pendapatan Transfer	Rp1,109,373,037,353	Rp1,087,761,742,229	98%
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp3,900,000,000	Rp3,825,000,000	98%
<b>B.</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp1,157,830,810,055</b>	<b>Rp1,082,546,272,647</b>	<b>93%</b>
1	Belanja Operasi	Rp856,706,951,464	Rp788,068,796,446	92%
2	Belanja Modal	Rp296,123,858,591	Rp290,872,850,601	98%

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3	Belanja Tak Terduga	Rp5,000,000,000	Rp3,604,625,600	72%
4	Belanja Transfer	Rp193,652,738,585	Rp193,308,409,085	100%
<b>Surplus/Defisit</b>		<b>Rp106,650,904,777</b>	<b>Rp133,667,125,525</b>	<b>69%</b>

Sumber: Data Bapenda Manggarai

## Analisis

Dari data di atas maka akan diketahui hasil analisis kinerja keuangan pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai.

## Rasio Pertumbuhan

Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan keuangan daerah:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

Sumber: (Drastiana and Himmati 2021)

Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan pemerintah selama periode anggaran mengalami pertumbuhan positif atau negatif.

Tabel 4. 4 Sumber Data Bapenda Manggarai

Tahun	Pendapatan	Pendapatan (t-1)	Rasio	Keterangan
2021	Rp1,171,395,111,025	Rp1,155,833,791,014	1.35%	Positif
2022	Rp1,148,633,546,856	Rp1,171,395,111,025	-1.94%	Negatif
2023	Rp1,264,481,714,832	Rp1,148,633,546,856	10.09%	Positif

Tabel 4. 5 Kriteria Penilaian Pertumbuhan

Presentase	Kriteria
>0.00%	Positif
<0.00%	Negatif

Sumber: (Patih et al. 2022)

Pada tabel 4.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa rasio pertumbuhan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2020 dan 2021 sebesar 1.35% tumbuh secara positif, pada tahun 2021 dan 2022 sebesar -1.94% tumbuh secara negatif, dan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 10.09% tumbuh secara positif.

## Rasio Efektifitas

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung rasio efektifitas keuangan daerah:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Sumber: (Drastiana and Himmati 2021)

Rasio efektifitas PAD dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hasil perhitungan rasio efektifitas PAD dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4. 6 Sumber Data Bapenda Manggarai

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio	Keterangan
2021	Rp104,045,446,627	Rp97,878,120,398	94.07%	Cukup Efektif
2022	Rp121,176,876,649	Rp110,722,937,745	91.37%	Cukup Efektif
2023	Rp151,208,677,479	Rp124,626,655,943	82.42%	Kurang Efektif

Tabel 4. 7 Kriteria Penilaian Efektifitas:

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Drastiana and Himmati 2021)

Pada tabel 4.6 di atas menjelaskan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan, dengan rasio efektifitas PAD cukup efektif pada 2021 sebesar 94.07% dan 2022 sebesar 91.37%, namun menurun menjadi kurang efektif pada 2023 sebesar 82.42%.

## Rasio Efisiensi

Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung rasio efisiensi keuangan daerah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*Sumber:* (Gea 2022)

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dan realisasi PAD yang diterima. Hasil dari perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4. 8 Sumber Data Bapenda Manggarai

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio	Keterangan
2021	Rp1,127,162,534,561	Rp1,142,553,988,621	98.65%	Kurang Efisien
2022	Rp1,105,257,718,284	Rp 1,090,365,130,064	101.37%	Tidak Efisien
2023	Rp1,082,546,272,647	Rp1,216,213,398,172	89.01%	Cukup Efisien

Tabel 4. 9 Kriteria Penilaian Efisiensi

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
<60%	Sangat Efisien
60%-80%	Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
>100%	Tidak Efisien

*Sumber:*(Drastiana and Himmati 2021)

Pada tabel 4.8 di atas dapat dijelaskan realisasi belanja daerah Kabupaten Manggarai fluktuasi dari 2021 hingga 2023, dengan rasio efisiensi keuangan yang beragam, kurang efisien pada 2021 sebesar 98.65%, tidak efisien pada 2022 sebesar 101.37%, dan cukup efisien pada 2023 sebesar 89.01%, yang mencerminkan ketidakstabilan kinerja keuangan.

## Rasio Kemandirian

Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

*Sumber:* (Runjung et al. 2022)

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan secara mandiri. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4. 10 Sumber Data Bapenda Manggarai

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio	Keterangan
2021	Rp104,045,446,627	Rp1,003,835,484,398	10.36%	Rendah Sekali
2022	Rp121,176,876,649	Rp941,000,860,207	12.88%	Rendah Sekali
2023	Rp151,208,677,479	Rp1,109,373,037,353	13.63%	Rendah Sekali

Tabel 4. 11 Kriteria Penilaian Kemandirian

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
0-25%	Rendah Sekali
26%-50%	Rendah
51-75%	Sedang
76%-100%	Tinggi

Sumber: (Runjung et al. 2022)

Tabel 4.10 di atas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai meningkat dari tahun 2021 hingga 2023, tetapi rasio kemandirian keuangannya sangat rendah, menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat.

## Perbandingan Rasio

Tabel 4. 12 Rasio Per Tahun

Rasio	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Rasio Pertumbuhan	1.35%	-1.94%	10.09%
Rasio Efektifitas	94.07%	91.37%	82.42%
Rasio Efisiensi	98.65%	101.37%	89.01%
Rasio Kemandirian	10.36%	12.88%	13.63%

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan perhitungan dari tabel di atas, dapat disimpulkan perbandingannya yaitu rasio pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan presentase 10.09%, rasio efektivitas tertinggi pada tahun 2021 dengan presentase 94.07% cukup efektif, rasio efisiensi paling efisien pada tahun 2023 dengan presentase 89.01% cukup efisien, dan rasio kemandirian tertinggi pada tahun 2023 dengan presentase 13.63%.

## **Pembahasan**

Berikut ini merupakan pembahasan terkait hasil analisis yang akan disampaikan melalui uraian.

### **Rasio Pertumbuhan**

Rasio pertumbuhan keuangan Kabupaten Manggarai menunjukkan fluktuasi tahunan, dengan pendapatan pada tahun 2021 sebesar Rp1.171.395.111.025 rasio pertumbuhan positif 1.35%, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi Rp1.148.633.546.856 rasio pertumbuhan negatif -1.94% akibat dampak peralihan dari masa COVID-19 ke new normal, dan kenaikan kembali pada tahun 2023 sebesar Rp1.264.481.714.832 rasio pertumbuhan positif 10.09%, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berhasil memulihkan dan mengoptimalkan pendapatan setelah tahun sebelumnya.

Rasio pertumbuhan keuangan di Kabupaten Manggarai menunjukkan fluktuasi, dengan pertumbuhan positif 1.35% pada 2021, penurunan -1.94% pada 2022 akibat pandemi, dan pemulihan positif 10.09% pada 2023. Sebaliknya, Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan pertumbuhan PAD yang konsisten, dengan peningkatan rasio pertumbuhan PAD dari 12.89% pada 2012 menjadi 81.43% pada 2014, meski terdapat fluktuasi pada belanja modal. Kesimpulannya, Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tren kenaiknyang stabil, sementara Kabupaten Manggarai berhasil pulih setelah penurunan akibat pandemi 2022.

## **Rasio Efektifitas**

Rasio efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Manggarai menunjukkan fluktuasi, dengan presentase 94.07% pada 2021, 91.37% pada 2022, dan penurunan menjadi 82.42% pada 2023. Kinerja keuangan Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 dan 2022 dapat dikatakan cukup efektif, namun pada 2023 dianggap kurang efektif karena rasio di bawah 100%. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pendapatan, serta dalam merealisasikan PAD belum tercapai dari yang direncanakan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kebijakan yang kurang tepat sasaran, seperti kegiatan yang tdiak optimal dalam memperkuat perekonomian masyarakat.

Pada Kabupaten Manggarai, rasio efektivitas PAD dari 2021-2022 tergolong cukup efektif dengan presentase 94.07%-91.37%, namun pada 2023 menurun menjadi 82.42% dan dianggap kurang efektif. Sementara itu, Kabupaten Aceh Timur menunjukkan kinerja yang tidak efektif dengan rata-rata di bawah 100%, menandakan pengumpulan PAD yang belum optimal. Provinsi Jawa Tengah, dengan rata-rata 99%, dikategorikan efektif, menunjukkan pengelolaan PAD yang hampir memenuhi target, dan Kabupaten Minahasa Selatan tercatat efektif dari 2011-2014 dengan sebagian besar rasio di atas 99%. Perbedaan ini menunjukkan variasi dalam manajemen keuangan dan kemampuan daerah dalam mengelola PAD.

## **Rasio Efisiensi**

Pada rasio efisiensi, antara tahun 2021 hingga 2023, belanja daerah Kabupaten Manggarai mengalami penurunan, yaitu dari Rp1.127.162.534.561 pada 2021 menjadi Rp1.082.546.272.647 pada 2023, seiring dengan penurunan realisasi pendapatan daerah dari

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rp1.142.553.988.621 pada 2021 menjadi Rp1.090.365.130.064 pada 2022, meskipun ada kenaikan pada 2023 menjadi Rp1.216.213.398.172. Penurunan pendapatan pada 2022 disebabkan oleh defisit APBD, di mana pengeluaran lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi di masa depan, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai perlu mengoptimalkan pendapatan dan menghemat anggaran belanja.

Tingkat efisiensi keuangan Kabupaten Manggarai tidak efisien karena belanja lebih besar dari pendapatan, sementara Kabupaten Aceh Timur menunjukkan efisiensi dengan rasio rata-rata di bawah 100%. Provinsi Jawa Tengah dinilai tidak efisien dengan rasio di atas 100%, mencapai 176% pada 2021, sedangkan Kabupaten Minahasa Selatan kurang efisien dengan rata-rata 96.29% pada 2011-2014. Secara keseluruhan, efisiensi keuangan di beberapa daerah cenderung tidak konsisten, dengan Aceh Timur menunjukkan pengelolaan yang lebih baik dibandingkan daerah lain yang menghadapi kendala pada tingginya belanja operasional.

## **Rasio Kemandirian**

Tingkat kemandirian Kabupaten Manggarai masih sangat rendah karena bergantung pada pendapatan transefer dari Pemerintah Pusat yang dominan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun PAD meningkat dari Rp104.045.446.627 pada 2021 menjadi Rp151.208.677.479 pada 2023, kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan tetap kecil. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat mencapai Rp1.003.835.484.398 pada 2021, menurun menjadi Rp941.000.860.207 pada 2022, dan naik lagi menjadi Rp1.109.373.037.353 pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah belum dioptimalkan, sehingga kemandirian fiskal Manggarai masih sangat terbatas.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tingkat kemandirian keuangan menunjukkan variasi signifikan antar daerah, dengan Kabupaten Manggarai tahun 2021-2023, Kabupaten Aceh Timur tahun 2010-2018, dan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011-2014 memiliki kemandirian rendah, bergantung pada transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi, sementara Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 menunjukkan kemandirian sangat tinggi dengan presentase 144%, mampu membiayai pembangunan secara mandiri. Perbedaan ini mencerminkan kapasitas ekonomi, di mana Provinsi dengan ekonomi lebih besar cenderung lebih mandiri dibandingkan kabupaten kecil.

## **Proporsi Komponen Belanja terhadap Pendapatan**

Proporsi komponen belanja terhadap pendapatan di Kabupaten Manggarai menunjukkan tren berbeda setiap tahun. Pada 2021, belanja operasi mendominasi dengan 67.71% diikuti belanja transfer 17.72%. Tahun 2022, proporsi belanja operasi meningkat menjadi 72.45%, mencerminkan fokus pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi, sementara belanja transfer menurun ke 15.94%. Tahun 2023, belanja modal meningkat signifikan menjadi 23.42%, menandakan peningkatan investasi untuk pembangunan daerah, meskipun belanja operasi tetap dominan dengan 67.79%. Hal ini menunjukkan perubahan prioritas pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan.

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang diperoleh oleh penulis mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Manggarai NTT tahun 2021-2023 adalah berikut ini:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan rasio pertumbuhan fluktuatif, dengan pertumbuhan positif 1.35% pada 2020-2021, negatif -1.94% pada 2021-2022 akibat pemulihan pasca-covid, dan kembali positif 10.09% pada 2023, mencerminkan kemampuan pemulihan ekonomi daerah.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai berdasarkan rasio efektivitas PAD tergolong cukup efektif pada 2021 94.07% dan 2022 91.37%, namun kurang efektif pada 2023 82.42% akibat pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pendapatan.
3. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai berdasarkan rasio efisiensi tahun 2021-2023 menunjukkan tren yang tidak stabil, dengan tingkat kurang efisien pada 2021, tidak efisien pada 2022, dan cukup efisien pada 2023, sehingga diperlukan penghematan anggaran belanja untuk mengoptimalkan pendapatan di masa mendatang.
4. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai berdasarkan rasio kemandirian tahun 2021-2023 tergolong sangat rendah dengan presentase 10.36%, 12.88%, dan 13.63%, menunjukkan pola hubungan instruktif di mana peran Pemerintah Pusat lebih dominan dibandingkan kemandirian daerah.

## Saran

Berikut merupakan saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian ini, dengan harapan supaya dapat bermanfaat bagi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai, dan juga bagi masyarakat umum, antara lain:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Pemerintah Kabupaten Manggarai disarankan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan kemandirian keuangan daerah karena kinerja keuangan saat ini belum maksimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan rasio-rasio dalam penelitian ini pada tahap berikutnya.
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan lebih tentang kinerja keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Nurul. 2015. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)* 80–91.
- Arikunto. 2020. Metode Kuantitatif Deskriptif. *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local*. 1(69):5–24.
- Drastiana, Tiyas, and Risdiana Himmati. 2021. Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan. 1(November):51–65.
- Faisal, and Akmal Nasution. 2016. Otonomi Daerah: Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi* 4(2):206–15.
- Fathah, Rigel. 2017. Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan* 8(1):33–48.
- Gea, S. W. F. 2022. Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi Dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan APBD Periode Tahun 2015
- Guntoro, Muhammad. 2021. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi Dan Demokratisasi. *Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon* 3(2):416.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Harahap, Heri Faisal. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4(1):34. doi: 10.33087/ekonomis.v4i1.87.
- Helmi, Herawati. 2019. Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Unihaz - JAZ* 2(1):1–10.
- Iin Ivanda Listari, Kukuh Harianto, and Trisnia Widuri. 2022. Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 4(3):129–40. doi: 10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.396.
- Kurniawan, Akhmad, Dyah Mutiarin, Noor Cahyadi, and Eko Saputro. 2023. Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017-2021. 157–68.
- Munawaroh, Nunung. 2019. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Media Birokrasi* Vol. 1 No.:143–56.
- Nurabiah, Nurabiah. 2018. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3(1):067–100. doi: 10.29303/jaa.v3i1.36.
- Patih, Suharto, Miki Indika, and Ismi Talia. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing* 17(1):64–76. doi: 10.37301/jkaa.v17i1.62.
- Putra, Syahri Azda. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 - 2020. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* 3(1):1–13. doi: 10.33105/jmp.v3i1.388.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Rifai, Maulana. 2017. Regional Autonomy and Globalization:A Development Model Study in Karawang Regency. *Jurnal Politikom Indonesiana* 2(Juli 2017):15–28.
- Runjung, R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma, Anindita Primastuti, and Riswati. 2022. Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)* 9(2):96–111.
- Syahara, Bunga Qolbiyah, and Muhammad Aufa. 2022. Provinsi Jawa Timur Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. 38(1):27–38.
- Syahrman, Syahrman. 2021. Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada Pt. Narasindo Mitra Perdana. *Juripol* 4(2):283–95. doi: 10.33395/juripol.v4i2.11151.
- Tumija, and Ghina Sinta. 2022. Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik* 9(2):61–78.